BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/668 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan dalam rangka pemenuhan hak–hak perempuan dan anak korban kekerasan maka perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap hak–hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Terpadu Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Terpadu Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dan bertugas:

a. DEWAN PENASEHAT
   1. merumuskan kebijakan tentang pelayanan bagi perempuan dan anak di Aceh Tamiang khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
   2. memfasilitasi hubungan kerja pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tamiang dengan instansi terkait dan Lembaga pelayanan lainnya di daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

b. DEWAN PEMBINA
   1. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan tentang pelayanan bagi perempuan dan anak di Aceh Tamiang khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
   2. memfasilitasi hubungan kerja pengelola P2TP2A Kabupaten Aceh Tamiang dengan instansi terkait dan khususnya Lembaga pelayanan lainnya didaerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

c. TIM PELAKSANA HARIAN
   1. melakukan koordinasi secara internal dengan Tenaga ahli, Koordinator, dan Pelaksanaan Harian terkait manajemen dan kinerja P2TP2A;
   2. melakukan koordinasi secara eksternal (eksekutif dan legislatif serta pihak swasta) untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan koordinasi terkait upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
   3. mengupayakan dan mencari peluang pendanaan yang bersumber dari APBK dan sumber lain yang tidak mengikat untuk kebutuhan;
   4. mengoordinir pelaksanaan tugas Pengurus P2TP2A Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
   5. membuat perencanaan program dan anggaran P2TP2A;
   6. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A;
   7. menjalankan, mengelola dan meningkatkan kapasitas organisasi sesuai dengan visi dan misi P2TP2A;
   8. mengoordinir kerjasama dengan instansi terkait (lintas sektor) dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
   9. mengoordinasikan berbagai bentuk pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak sesuai dengan mandat P2TP2A;

10. mengoordinasikan...

10. mengoordinasikan pendataan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani dan mempublikasikannya apabila dibutuhkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Syari'ah melalui Kepala Dinas;
11. menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
12. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
13. melakukan koordinasi layanan di bawah Divisi Keuangan P2TP2A;
14. menyampaikan laporan tiga bulan kinerja Divisi Keuangan kepada Ketua Harian P2TP2A;
15. menindak sebagai Manager Kasus yang melakukan koordinasi layanan di bawah Divisi Pelayanan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan bagi mitra sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A;
16. mengoordinasikan upaya perlindungan mitra ke rumah aman (*shelter*) sebagai tempat perlindungan sementara bagi mitra;
17. melakukan tabulasi dan update perkembangan kasus yang ditangani P2TP2A secara reguler tiap bulannya;
18. membantu Ketua Divisi dalam penyusunan laporan tiga bulanan kepada Ketua P2TP2A;
19. memberikan layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan mitra;
20. menginisiasi pelaksanaan bedah kasus secara internal terhadap kasus-kasus tertentu yang dianggap membutuhkan intervensi secara khusus;
21. menentukan kasus-kasus tertentu yang sedang ditangani yang akan dijadikan materi *case conference;*
22. menyampaikan laporan tiga bulan kinerja Divisi Pelayanan kepada Ketua Harian P2TP2A;
23. menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap Layanan Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan;
24. menerima setiap pengaduan yang dilaporkan ke P2TP2A dengan memastikan pengisian formulir yang sudah disediakan dengan baik secara langsung. dilakukan oleh mitra atau pendamping maupun tidak langsung melalui telepon atau media lainnya;
25. mencatat dan merekapitulasi setiap pengaduan yang masuk ke P2TP2A;
26. menerima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari lembaga pemberi layanan lainnya;
27. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap P2TP2A Kabupaten/Kota dalam penggunaan aplikasi E-Kekerasan;

28. melakukan...

47. membangun koordinasi dengan Divisi Layanan untuk mendukung proses pengumpulan data yang akan dipublikasikan secara regular; dan
48. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan penugasan yang diberikan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 pagu anggaran Dinas Pemberdayaan dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening: 2.08.03.2.02.0008.5.1.02.02.001.00004.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Agustus 2026 M
19 Safar 1448 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

Salinan, dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/668 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TAMIANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	DEWAN PENASEHAT		
1.	Bupati Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
4.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
5.	Kapolres Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
6.	Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang.	Dewan Penasehat	
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
8.	Kepala Mahkamah Syari'ah Kualasimpang.	Dewan Penasehat	
9.	Kepala Dinas Sosial Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
11.	Kepala Kementerian Agama Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
12.	Kepala BNN Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
	DEWAN PEMBINA		
1.	Ketua TP-PKK Aceh Tamiang.	Dewan Pembina	
2.	Ketua Dharma Wanita Aceh Tamiang.	Dewan Pembina	
	TIM PELAKSANA HARIAN		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.	Pengarah	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/668 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TAMIANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	DEWAN PENASEHAT		
1.	Bupati Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
4.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
5.	Kapolres Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
6.	Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang.	Dewan Penasehat	
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
8.	Kepala Mahkamah Syari'ah Kualasimpang.	Dewan Penasehat	
9.	Kepala Dinas Sosial Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
11.	Kepala Kementerian Agama Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
12.	Kepala BNN Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang.	Dewan Penasehat	
	DEWAN PEMBINA		
1.	Ketua TP-PKK Aceh Tamiang.	Dewan Pembina	
2.	Ketua Dharma Wanita Aceh Tamiang.	Dewan Pembina	
	TIM PELAKSANA HARIAN		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.	Pengarah	

2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.	Penanggung jawab	
3.	Kapala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Ketua	
4.	Cut Nanda Nofrita, S.STP, MAP	Wakil Ketua	
5.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (Deni Maharani, SE)	Sekretaris	
6.	Sastri Delila, M.Si	Anggota	Pendamping Kasus
7.	Fenti Mafika, S.Keb	Anggota	Pendamping Kasus
8.	Hafisza Ilhami, S. Tr. Keb.	Anggota	Pendamping Kasus
9.	Oliani, S.Tr. Keb	Anggota	Pendamping Kasus
10.	Unsur Dinas Kesehatan Aceh Tamiang.	Anggota	Pendamping Kasus
11.	Nur Alfi Azomi, S.Sos.	Anggota	Pendamping Kasus
12.	Unsur RSUD Aceh Tamiang	Anggota	Pendamping Kasus
13.	Yulfa Islaini, S.Psi, M.Psi, Psikolog	Anggota	Pendamping Kasus
14.	Dewi Kartika, SH	Anggota	Pendamping Kasus
15.	Unsur Unit PPA Polres Aceh Tamiang.	Anggota	Pendamping Kasus
16.	Unsur Polsek dalam Kab. Aceh Tamiang	Anggota	Pendamping Kasus
17.	Unsur Koramil dalam Kab. Aceh Tamiang	Anggota	Pendamping Kasus
18.	Unsur Kementerian Agama Aceh Tamiang.	Anggota	Pendamping Kasus
19.	Supir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Tarmizi)	Anggota	Pendamping Kasus

BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/668 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TAMIANG

BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ KASUS (Rp.)	KETERANGAN
1.	Dewan Penasehat	-	13 Orang
2.	Dewan Pembina	-	2 Orang
3.	Pengarah	-	
4.	Penanggung Jawab	-	
5.	Ketua	-	
6.	Wakil Ketua	-	
7.	Sekretaris	-	
8.	Anggota	600.000,-	10 Orang

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 1 Januari 2026
BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI